

PENDIDIKAN KEJURUAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Murwatie B. RAHARDJO*

PENGANTAR

Hakikat pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga jelas adanya interaksi antara pendidikan dan pembangunan. Pada permulaan pelaksanaan Repelita III ini, dunia pendidikan kita telah mengalami kemajuan setapak. Hal ini ditandai dengan selesainya tugas dan berhasilnya Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional atas penugasan Presiden Republik Indonesia, dalam menyusun suatu konsep mengenai Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional. Dari langkah ini terlihat jelas betapa bangsa Indonesia berusaha keras untuk menangani bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya melalui pembaharuan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kondisi dan cita-cita Indonesia.

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan kejuruan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, menjadi bagian yang sangat penting, yang dalam tulisan ini ingin dicoba dikemukakan tentang keadaan dan beberapa permasalahan di dalamnya.

PENDIDIKAN KEJURUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER ALAM

Sehubungan dengan usaha pengembangan sumber-sumber alam yang merupakan potensi utama kekayaan negara, sangat dibutuhkan tenaga-tenaga kerja trampil. Manusia merupakan pengelola yang harus memanfaatkan, memelihara, mengamankan dan mengembangkan kekayaan alam. Tanpa

* Staf CSIS

adanya peningkatan kualitas dari manusia-manusianya, kekayaan alam yang tersedia tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan mungkin mengalami kerusakan.

Seperti kita semua menyadari, bahwa negara kita cukup mempunyai sumber-sumber alam yang berpotensi ekonomi besar. Hal ini juga disadari oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini yang telah melihat dan mengetahui sendiri potensi sumber-sumber alam kita melalui penelitian-penelitian mereka sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak bangsa Indonesia. Dan dengan terlaksananya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, maka aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber alam Indonesia menanjak dengan pesat. Kegiatan ini yang menonjol terutama dalam bidang-bidang kehutanan, penambangan minyak, mineral-mineral (yang terpenting adalah timah, tembaga, nikel dan bauksit), dan pertanian termasuk perikanan baik laut maupun air tawar.¹ Hasil yang didapat dari eksplorasi sumber-sumber alam yang dilakukan secara besar-besaran tersebut sampai kini merupakan faktor penting dalam pendapatan devisa negara. Sehingga dengan demikian kekayaan alam negara kita ini tetap merupakan tulang punggung bagi pembangunan sekarang dan masa yang akan datang dalam rangka mensejahterahkan kehidupan rakyat Indonesia.

Secara khusus sumber alam Indonesia sebagai milik utama kita dapat dijadikan dasar pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Tanah yang subur, hutan-hutan, air, lautan dan sumber-sumber mineral apabila dikembangkan dan diatur secara bijaksana dapat menstimulasi pengembangan secara regional, memberikan kesempatan kerja kepada penduduknya terutama bagi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Hasil-hasil dari pelaksanaan Repelita sudah dapat kita rasakan, di mana pembangunan ini ditopang dengan hasil pemanfaatan sumber-sumber alam yang telah dikelola. Hal ini terutama berasal dari sumber alam yang tinggal mengambil hasil-hasilnya seperti batu bara, minyak bumi, air, ikan dan hasil pertanian termasuk kehutanan.

Perhatian yang cukup besar kini juga diarahkan kepada pengembangan sumber alam yang berupa tata lingkungan fisik seperti air terjun, sungai, pegunungan, tanah yang subur, pantai berpasir dan lain-lain. Kemungkinan-kemungkinan perluasan pemanfaatan berbagai macam medan lingkungan fisik alam yang ada di Indonesia kiranya perlu mulai dipikirkan. Hal ini dimaksudkan agar supaya di masa-masa yang akan datang kehidupan perekonomian negara kita tidak hanya tergantung dari sumber-sumber yang pada waktu sekarang ini merupakan sumber penghasil devisa yang terbesar seperti minyak dan hasil kehutanan, khususnya kayu.

1 Prof. Dr. J.A. Katili, "Workshop tentang Natural Resources," dalam *Berita LIPI*, No. 1, 1972, hal. 23

Usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah antara lain pembangunan dan pengembangan Daerah-daerah Aliran Sungai (DAS), air terjun dan sebagainya. Sebagai contoh konkrit adalah proyek raksasa yang sedang giat dibangun di daerah Sumatera Utara dalam memanfaatkan keadaan fisik Danau Toba dan Sungai Asahan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Danau Toba dan Sungai Asahan dapat merupakan kesatuan wilayah berpotensi ekonomis yang dapat dimanfaatkan secara regional dan nasional. Proyek tersebut adalah upaya untuk melipatgandakan potensi tersebut di mana hal ini akan menjadi unsur yang sangat kuat dalam perekonomian nasional jangka panjang.¹ Seperti diketahui bahwa perhatian proyek ini adalah memanfaatkan air Danau Toba sebagai penggerak energi melalui air terjun Sigura-gura dan Tangga dengan mendirikan dua buah PLTA di kedua tempat tersebut. Listrik yang akan dihasilkan oleh kedua PLTA tersebut sementara adalah sebesar 513.000 kilowatt. Aliran listrik ini selain untuk keperluan konsumsi di kota-kota, pelabuhan-pelabuhan, tetapi yang terutama adalah untuk keperluan sebuah pabrik peleburan aluminium yang memiliki kapasitas produksi sebesar 225.000 ton setahun.²

Dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, proyek Asahan ini dapat ditinjau dari segi-segi masa pembangunan secara fisik serta pengaruhnya terhadap perkembangan daerah Sumatera Utara khususnya dan pada kegiatan perekonomian secara nasional pada umumnya. Sejak dimulainya proyek Asahan ini (1975), banyak kesempatan kerja terbuka baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Kegiatan-kegiatan di bidang-bidang pembangunan, pengangkutan, suplai, disain, teknik, pengerukan dan lain-lain, memberikan kesempatan kerja kepada para pekerja, ahli, teknisi dan lain-lain. Harapan yang tidak mustahil terjadi adalah adanya efek ganda kesempatan kerja tersebut, misalnya dalam bidang-bidang perumahan (sewa-menyewa), pertokoan, restoran, hotel, pengangkutan pesawat, catering dan lain-lain.³

Sehingga dengan demikian dalam hal pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia, maka tidak hanya terbatas pada lapangan kerja di industri peleburan aluminium yang nantinya hanya menampung secara tetap sekitar 2.100 orang pekerja dan proyek pembangkit tenaga listrik yang menampung kira-kira 100 orang pekerja.⁴ Akan tetapi pembangunan sarana-sarana selama pem-

1 *Kompas*, tanggal 9 Juni 1981

2 J. Panglaykim, "Proyek Asahan: Suatu Pandangan dari Sektor Bisnis," dalam *Analisa*, No. 7, 1981, hal. 621

3 *Ibid.*, hal. 629

4 Pande Radja Silalahi, "Beberapa Catatan tentang Pemanfaatan dan Manfaat Proyek Asahan," dalam *Analisa*, No. 5, 1981, CSIS Jakarta, hal. 424

bangunan proyek ini akan tetap bermanfaat, yaitu dengan adanya pengaruh dari pembangunan proyek itu sendiri terhadap kemungkinan timbulnya industri-industri (kecil) yang lain. Seperti diketahui bahwa hasil Perkebunan Besar di Sumatera Utara adalah yang terpenting sesudah minyak bumi. Jenis tanaman perkebunan besar ini terdiri dari karet, kelapa sawit, tembakau, teh dan cokelat. Kemungkinan pendirian pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil perkebunan setempat dapat ditopang dengan hasil industri peleburan aluminium di propinsi ini. Pabrik-pabrik tersebut misalnya pabrik minyak kelapa sawit, pabrik rokok, pabrik pengolahan cokelat, pabrik kertas (yang bahan bakunya dari hasil hutan pinus di daerah sekitar Danau Toba) dan sebagainya.¹

Contoh di atas adalah salah satu dari realisasi pemanfaatan sumber alam berupa lingkungan fisik Danau Toba dan Sungai Asahan dan daerah sekitarnya dalam rangka pembangunan secara keseluruhan. Apabila ditinjau mulai dari segi penelitian sampai dengan mulai beroperasinya proyek ini serta pengaruh-pengaruhnya terhadap perkembangan daerah-daerah di Sumatera Utara khususnya, maka dapat dipastikan bahwa hal ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kenyataan yang jelas adalah bahwa kebutuhan akan tenaga kerja secara kuantitatif cukup tersedia. Kini yang menjadi masalah adalah apakah tenaga-tenaga kerja yang akan mempunyai kesempatan luas untuk memasuki lapangan-lapangan kerja tersebut cukup siap dengan bekal untuk bekerja. Di sini terlihat adanya kebutuhan tenaga kerja yang trampil atau yang mempunyai keahlian, terutama yang paling banyak adalah ketrampilan tingkat menengah akan paling banyak diperlukan.

Dalam kaitannya dengan usaha pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sarana kelembagaan untuk mencetak tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan antara lain adalah pendidikan di sekolah, khususnya Sekolah Kejuruan. Lembaga pendidikan ini juga telah tersedia dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Apabila kita melihat lebih jauh arah pembangunan yang sedang dan akan dijalankan, maka peranan pendidikan kejuruan ini tentu akan lebih besar lagi. Hal ini bisa terjadi apabila pembangunan juga lebih jauh mengarah kepada pemanfaatan sumber alam berupa lingkungan fisik yang tidak hanya berskala besar seperti halnya proyek Asahan, tetapi juga yang berskala kecil dan berjumlah banyak di seluruh Indonesia. Keadaan semacam ini tentu akan memerlukan tenaga-tenaga kerja dengan mutu ketrampilan yang sesuai.

Perkiraan World Bank tentang kebutuhan tenaga kerja non-pertanian bagi pembangunan di Indonesia tampak dalam Tabel 1 berikut ini.

¹ *Profil Indonesia 1979*, Lembaga Studi Pembangunan, hal. 262

Tabel 1

PERKIRAAN TENAGA KERJA MENURUT KEAHLIANNYA, TAHUN 1971, 1975 DAN 1990				
Gol. Keahlian	1971	1975	1990	Tingkat Pertumbuhan per tahun 1975-1990 (%)
1. Profesional	180	230	440	4,4
2. Teknisi	540	700	1.330	4,4
3. Skilled Workers	1.450	2.050	4.960	6,1
4. Semi-skilled & unskilled workers	12.300	15.700	28.700	4,1
5. Jumlah	14.400	18.700	35.500	4,4

Sumber: "Indonesia Staff Appraisal Report; Polytechnic Project", World Bank, 1979, Washington D.C., dalam *Indonesia: T.A. No. 323 Senior Technical Schools Project Phase II* (Final Report), *Volume I The Proposal*, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, August 1980

Dalam perkiraan ini, juga diharapkan pertumbuhan skilled workers yang lebih tinggi daripada golongan tenaga kerja yang lainnya. Dari tahun 1971 sampai tahun 1990 diharapkan pertumbuhan skilled workers per tahunnya 6,1%; sedangkan untuk kebutuhan tenaga profesional, teknisi dan semi-skilled dan unskilled workers adalah di atas 4% per tahunnya.

PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Sejarah pendidikan kejuruan dimulai dari usaha-usaha manusia untuk mempelajari cara-cara untuk bekerja. Dengan bekerja memungkinkan orang dapat memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya. Manusia lebih dahulu belajar untuk memperbaiki nasibnya dengan daya upaya kerja. Selain itu manusia juga mempelajari cara-cara bekerja agar memperoleh hasil yang efisien. Setelah manusia mempelajari cara-cara baru untuk bekerja, ternyata bahwa masing-masing orang mempunyai kemampuan untuk tugas-tugas tertentu yang lebih baik daripada yang lain. Misalnya dalam suatu keluarga, laki-laki lebih efisien dalam menyediakan bahan mentah untuk makan, pakaian dan perumahan. Sedangkan anggota keluarga wanita lebih efisien dalam mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan tersebut un-

tuk dimanfaatkan.¹ Kemudian manusia mengembangkan ketrampilan khusus dengan mempraktekkan dalam bidang perdagangan, pengerjaan kayu, pemotongan batu, peternakan dan lain-lain. Adanya pembagian kerja semacam ini, memungkinkan kesempatan bagi masing-masing orang untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Di sini kemudian menjadi penting adanya penggunaan metode belajar yang baru untuk bekerja. Terutama hal ini penting bagi kaum muda yang mempunyai kemampuan khusus dan menempatkan mereka ke jurusan-jurusan menurut bakat dan kemampuannya. Untuk belajar kaum muda ini memerlukan waktu dalam sistem magang, yang merupakan bentuk organisasi belajar, yang pertama yang timbul kemudian.²

Dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan di Indonesia seperti yang diterangkan dalam kebijaksanaan pokok Repelita III, antara lain disebutkan, bahwa dalam usaha untuk menguasai teknologi maka pendidikan ketrampilan akan ditingkatkan pelaksanaannya sejak Sekolah Dasar. Peningkatan ini dapat dilihat dari kurikulum yang diberikan pada sekolah-sekolah. Pendidikan ketrampilan ini berfungsi untuk mengembangkan dan mempersiapkan kemampuan anak didik sebagai tenaga kerja produktif dengan penekanan pada penanaman apresiasi dan penghargaan terhadap pekerjaan tangan.

Dalam sistem pendidikan nasional sekarang ini, peranan Sekolah Menengah Kejuruan menjadi semakin penting. Pendidikan kejuruan ini merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi yang harus dijalankan terus menerus. Inti dan orientasi sistem pendidikan kejuruan adalah dunia usaha dan industri yang langsung melakukan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian dalam pembangunan ekonomi, masalah akumulasi modal uang bukanlah masalah yang terlalu sulit untuk dipecahkan. Seperti diketahui bahwa dalam rangka memanfaatkan segala potensi negara untuk membangun suatu landasan ekonomi yang kuat perlu dilaksanakan pembangunan yang meliputi segala bidang sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk kesemuanya itu memang diperlukan pembiayaan yang memadai terutama sekali dari sumber-sumber dalam negeri. Oleh karena itu dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai melalui masa-masa pelaksanaan Repelita I, II dan III, secara berangsur-angsur negara kita antara lain berusaha agar supaya mampu mengatasi masalah pembiayaan ini melalui tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Meskipun dana/bantuan dari luar negeri tetap diperlukan, namun pembangunan ini

1 Roy W. Roberts, *Vocational and Practical Arts Education*, Harper and Row, New York, 1965, hal. 31

2 *Ibid.*, hal. 32

tidak harus tergantung kepadanya. Hal ini dapat dinyatakan dari semakin kecilnya peranan bantuan luar negeri dalam anggaran pembangunan RAPBN selama masa-masa Repelita I, II dan III (lihat Lampiran 1). Masalah yang penting untuk segera ditanggulangi dan sangat terasa kini adalah masalah modal daya manusia, dalam arti kurangnya tenaga-tenaga trampil di segala lapangan kerja untuk semua tingkatan pendidikan. Modal daya manusia ini meliputi antara lain kemampuan untuk melakukan wirausaha/wirawasta, yaitu kemauan dan kemampuan mengambil resiko untuk menciptakan pembaruan dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal daya manusia adalah dengan meningkatkan perhatian dan fasilitas Sekolah Kejuruan. Namun dalam kenyataan sekarang ini, minat masuk Sekolah Kejuruan semakin merosot. Masalah ini dapat ditunjukkan dalam Tabel 2. Dalam tabel ini terlihat bahwa dari tahun 1974 sampai tahun 1977, secara proporsional jumlah murid Sekolah Kejuruan terus menerus berkurang baik untuk tingkat SLTP maupun SLTA. Suatu kenyataan bahwa di satu pihak lulusan Sekolah Kejuruan kurang mendapatkan kesempatan kerja baik di sektor pemerintah yang memang terbatas maupun di sektor swasta. Di pihak lain, sebagian besar lulusan Sekolah Kejuruan belum siap untuk terjun sebagai tenaga kerja trampil. Untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi juga

del 2

RKEMBANGAN JUMLAH MURID TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH 1974-1977

tingkatan & jenis kelamin	1974	%	1975	%	1976	%	1977	%
MP/Junior Secondary School	1.691.078		1.900.154		2.136.067		2.339.835	
MP/General J.S.S.	1.327.811	78,5	1.518.393	80	1.747.366	81,8	2.028.485	86,7
MEP/Economics J.S.S.	126.557	7,5	132.216	7	138.638	6,5	102.774	4,4
KKP/Home Economics J.S.S.	51.110	3,0	52.250	2,7	49.282	2,3	39.763	1,7
T/Technical J.S.S.	185.600	11	197.295	10,3	200.781	9,4	168.813	7,2
MA/Senior Secondary School	729.893		802.823		941.583		1.108.079	
MA/General S.S.S.	318.996	43,7	344.955	43	401.062	42,6	491.860	44,4
MEA/Economics S.S.S.	149.333	20,4	158.518	19,7	177.308	18,8	193.241	17,4
KKA/Home Economics S.S.S.	22.070	3,0	23.772	3	24.491	2,6	25.594	2,3
TM/Technical S.S.S.	154.177	21,2	165.331	20,6	196.416	20,9	216.810	19,6
PG/Teacher Training	79.067	10,8	102.847	12,8	133.756	14,2	170.951	15,4
GO/Sport Teacher Training	6.250	0,9	7.400	0,9	8.550	0,9	9.523	0,9

Sumber: BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Statistik Persekolahan 1977*

kurang mendapat kesempatan. Semula ada peraturan Perguruan Tinggi, bahwa lulusan SLA Kejuruan yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi diwajibkan bekerja selama 2 tahun. Kini peraturan ini telah dihapuskan, namun prioritas masih tetap diberikan kepada lulusan yang nilai rata-ratanya minimum mencapai angka tujuh. Hal ini digunakan sebagai cara untuk menanggulangi masalah dan kenyataan masih sempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka dan juga masih terbatasnya pendidikan tinggi yang sealur.¹ Dengan demikian pandangan/anggapan masyarakat bahwa lulusan SLA Kejuruan tidak dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi diharapkan dapat berubah.

Dalam upaya memenuhi keperluan tenaga-tenaga kerja trampil yang dibutuhkan dalam pembangunan yang akan datang ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam Pelita III. Usaha tersebut dilakukan dengan memperbanyak jumlah Sekolah Kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Walaupun demikian tidak dimaksudkan bahwa jumlah Sekolah Kejuruan proporsional dengan Sekolah Umum.² Selain itu juga dilakukan pembinaan Sekolah Kejuruan yang telah ada, meliputi 240 buah Sekolah Teknik (S.T.) dan 110 Sekolah Kesejahteraan Keluarga (SKK); sedang pada tingkat SLTA akan dipusatkan pada 18 STM Pembangunan (4 tahun), 148 STM (3 tahun), 10 STM Khusus (Penerbangan, Perkapalan dan Grafika) serta Pusat Latihan Pendidikan Teknik (PLPT).

Pembangunan Sekolah-sekolah Kejuruan dimaksudkan untuk menampung pertambahan murid Sekolah Menengah Kejuruan yang diperkirakan sejumlah 59 ribu orang. Jumlah murid SLTP Kejuruan pada tahun 1979 adalah sebesar 153 ribu orang, sehingga pada tahun 1984 akan menjadi 212 ribu orang murid. Pada tingkat SLTA Kejuruan diperkirakan pada akhir Pelita III akan bertambah dengan 115 ribu murid. Untuk kesemuanya itu diperlukan pula tambahan jumlah gedung, guru dan buku-buku pelajaran yang sepadan dengan pertambahan jumlah murid.³

Sebagai gambaran perlu dikemukakan, bahwa pendidikan ketrampilan juga diberikan kepada murid-murid Sekolah Menengah Umum yang tercakup di dalam Kurikulum tahun 1975, di mana pendidikan ketrampilan ini mendapat alokasi waktu sebanyak 15%. Dalam hal ini pendidikan ketrampilan dimaksudkan agar supaya siswa memiliki sesuatu kemampuan untuk bekerja yang dapat digunakan bila tidak melanjutkan studinya. Dari pendidikan ini memang sukar diharapkan bahwa seorang siswa menjadi mahir dalam suatu

1 Lihat *Kompas*, tanggal 22 Juli 1981

2 Lihat *Kompas*, tanggal 14 Agustus 1981

3 Dari buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun III, 1979/1980-1984/1985*

jenis profesi yang siap sebagai bekal bekerja. Namun demikian hal ini dapat mempersiapkan siswa untuk mengikuti latihan persiapan bekerja. Program pendidikan ketrampilan ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesan masyarakat selama ini bahwa Sekolah Menengah Umum semata-mata merupakan wadah untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

PENDIDIKAN KEJURUAN BAGI PEMBANGUNAN

Pendidikan secara umum merupakan penggerak utama ke arah modernisasi. Hal ini terjadi oleh karena untuk mewujudkan suatu masyarakat modern diperlukan antara lain kemajuan teknologi, usaha penelitian yang terus menerus yang memungkinkan terjadinya pembaharuan secara terus menerus. Sudah sejak lama segi ekonomi dari pendidikan menjadi salah satu pembicaraan yang penting, namun pemikiran tentang fungsi pendidikan untuk mempercepat laju tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan masih baru.¹ Pemikiran ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Suatu studi yang dilakukan Dukrust atas perkembangan empiris tahun 1900-1955 di Norwegia memperlihatkan bahwa investasi-investasi luar biasa banyaknya tidak menjamin tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara investasi dan kenaikan output adalah jauh lebih rumit dari yang diperkirakan semula. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dapat dicapai dengan cara memperbaiki faktor manusianya sebagai tenaga kerja disertai dengan peningkatan mutu dari organisasi dan teknik secara berangsur-angsur.²

Hasil penelitian Devison mengenai pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat memperlihatkan pula bahwa pertumbuhan "real national income" dalam periode 1929-1957 sebesar 23%, disebabkan oleh perbaikan mutu pendidikan angkatan kerja.³ Sedangkan Fabricant menemukan pula kenyataan bahwa sekitar 75% dari output per 'man hour' semenjak tahun 1900 disebabkan oleh kemajuan teknik dan bukan oleh pembentukan modal.⁴

-
- 1 Samuel Bowles, *Planning Educational Systems for Economic Growth*, Harvard University Press/1969, Cambridge, Massachusetts, hal. 2
 - 2 Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo, dkk., *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, P.T. Gunung Agung, Jakarta, hal. 39
 - 3 E.F. Devison, *Measuring the Contribution of Education and the Residual to Economic Growth*, hal. 315, dalam buku *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, hal. 40
 - 4 S. Fabricant, "Basic Faction Productivity Change", *National Bureau of Economic Research*, New York, 1959, dalam buku *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, hal. 40.

Oleh karena itu dalam usaha menjamin kemajuan ekonomi ataupun kestabilan sosial, kiranya investasi bukan hanya diarahkan untuk meningkatkan "physical capital stock" (dalam bentuk model padat karya sebagai usaha untuk menanggulangi masalah pengangguran yang disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja), tetapi juga ditujukan kepada "human capital stock" (terutama dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan).

Pada waktu ini di Indonesia cukup disadari adanya kebutuhan tenaga kerja trampil guna pengelolaan sumber-sumber alam yang ada, terutama pada tingkat menengah. Tenaga kerja tingkat menengah ini terutama sangat diharapkan berasal dari Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan. Dari pendidikan kejuruan ini pemerintah dapat secara langsung ikut terlibat dalam masalah-masalah belajar-mengajar seperti halnya pada sekolah-sekolah formal yang lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil tingkat tinggi/ahli dapat dihasilkan dari lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini berarti pemerintah dapat memperhatikan segala aspek dari pendidikan kejuruan, baik aspek guru/pengajar, siswa/pelajar maupun aspek sarana dan prasarana. Dari ketiga aspek ini bisa timbul berbagai macam masalah. Masalah pengajar pada Sekolah Kejuruan terutama adalah kurangnya tenaga guru yang benar-benar bermutu. Dalam dunia pendidikan masalah ini telah menjadi masalah umum namun sangat mendesak, oleh karena adanya pertambahan penduduk yang perlu mendapatkan pendidikan dari tahun ke tahun. Walaupun dari sisi lain profesi sebagai guru dinilai masyarakat kurang menarik, namun usaha menambah guru secara kuantitatif selalu dilakukan (lihat Tabel 3). Masalahnya menjadi jelas dengan adanya kecenderungan per-

Tabel 3

PERKEMBANGAN JUMLAH GURU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN ATAS, UMUM DAN KEJURUAN, 1974-1977

Tingkatan & Jenis Sekolah	1974	1975	1976	1977
<i>SLTP:</i>	<i>109.956</i>	<i>117.584</i>	<i>123.555</i>	<i>134.012</i>
Umum	79.324	87.194	93.920	108.722
Kejuruan	30.632	30.390	29.635	25.290
<i>SLTA:</i>	<i>61.566</i>	<i>64.514</i>	<i>69.288</i>	<i>75.772</i>
Umum	25.191	27.331	28.813	31.750
Kejuruan	36.375	37.183	40.475	44.022

pindahan profesi guru Sekolah Kejuruan ke bidang usaha dan industri. Untuk mengatasi masalah ini, pemikiran dan penelitian terus menerus tentang sistem penggajian beserta kesejahteraan guru baik sebagai guru Sekolah Kejuruan negeri maupun swasta harus dilakukan bersamaan dengan usaha mengatasi masalah menurunnya gairah mengajar pada Sekolah Kejuruan. Hal ini mengingat bahwa guru, di samping bertugas mengantarkan anak didik menuju ke kehidupan yang lebih baik, sebagai anggota masyarakat juga memerlukan kehidupan yang layak.

Sebagai bahan perbandingan dapat disebutkan, bahwa dipandang dari segi kuantitas, jumlah guru untuk Sekolah Menengah di Indonesia masih cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari keadaan pada tahun 1977. Perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid pada SLP Umum yaitu 1 : 19; pada SLP Kejuruan 1 : 13. Sedangkan perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk SLA Umum adalah 1 : 16; pada SLA Kejuruan 1 : 14; dan pada SPG adalah 1 : 16.¹

Dari aspek/pelajar Sekolah Kejuruan, maka masalahnya tidak terlepas dari masalah enrollment. Setiap menjelang tahun ajaran baru, jumlah minat pendaftar Sekolah Kejuruan tidak sebesar pada sekolah umum. Hal ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan anggapan masyarakat yang masih menilai sekolah umum lebih tinggi daripada sekolah kejuruan. Berkembangnya gejala ini dapat terlihat dari melonjaknya aspirasi orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya tanpa selalu didasarkan atas perhitungan nyata akan hasil yang pasti segera diperoleh. Bahkan sebagian orang tua berpendapat, bahwa pendidikan mempunyai nilai intrinsik dan merupakan investasi yang tidak mudah terganggu oleh proses inflasi.² Sehingga bagi mereka tidak ada masalah tentang relevan tidaknya kaitan pendidikan melalui sekolah dengan pekerjaan tertentu. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan bagi perkembangan Sekolah-sekolah Kejuruan oleh karena maksud didirikannya sekolah-sekolah kejuruan adalah untuk mempersiapkan tenaga trampil tingkat menengah.

Berdasarkan pemikiran di atas dalam usaha pembangunan pendidikan kejuruan perlu kiranya diperhatikan segala aspek baik di dalam pelaksanaan sistem pendidikan kejuruan sendiri maupun hasil dari pendidikan kejuruan. Artinya bahwa lulusan Sekolah Lanjutan Kejuruan merupakan persediaan tenaga kerja yang benar-benar siap dengan ketrampilan maupun kepandaian sesuai dengan kejuruannya. Hal ini dapat dicapai apabila dalam pelaksanaan

1 Diolah dari data *Statistik Persekolahan 1977*, BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

2 Winarno Surakhmad, "Problematik Pembaharuan Pendidikan," dalam *Prisma*, Pebruari 1981

sistem pendidikan kejuruan melalui sekolah-sekolah, memang merupakan usaha yang benar-benar ditujukan untuk mempersiapkan dan menciptakan tenaga kerja yang siap melaksanakan pembangunan. Sehingga untuk mencapai tujuan ini kiranya pemerintah sebagai alat pembangunan (dalam arti institusional) dapat berperan sangat menentukan terhadap penilaian dari masyarakat tentang sekolah kejuruan. Dengan perkataan lain apabila lulusan Sekolah Lanjutan Kejuruan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ketrampilan mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, maka penilaian masyarakatpun dapat dipastikan akan berubah.

Tabel 4 berikut ini menunjukkan tingkat pengangguran lulusan Sekolah Lanjutan Umum dan Kejuruan menurut data dari Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 1976 dan tahun 1978. Selama dua tahun tingkat pengangguran di Indonesia yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama baik Umum maupun Kejuruan terlihat menurun. Tingkat pengangguran yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas Umum juga menurun dari 10,8% (tahun 1976) menjadi 9,6% (tahun 1978); akan tetapi yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas Kejuruan mengalami kenaikan dari 8,8% (tahun 1976) menjadi 11,0% (tahun 1978). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada waktu itu lulusan Sekolah Kejuruan, terutama tingkat Lanjutan Atas, masih belum sepenuhnya mendapat jaminan pekerjaan. Padahal apabila dibandingkan dengan lulusan Sekolah Lanjutan Umum, lulusan Sekolah Lanjutan Kejuruan sebenarnya lebih berpotensi sebagai tenaga kerja. Selain itu, dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa lulusan SLP Kejuruan sebagai tenaga kerja keadaannya tidak sama dengan SLA Kejuruan. Apabila dibandingkan

Tabel 4

PENCARI KERJA DAN PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN LULUSAN SEKOLAH LANJUTAN UMUM DAN KEJURUAN						
Pendidikan	Tidak bekerja dan mencari pekerjaan		Angkatan Kerja		% Tingkat Pengangguran	
	1976	1978	1976	1978	1976	1978
SLP Umum	138.667	142.748	1.796.116	1.911.845	7,7	7,5
SLP Kejuruan	35.368	47.352	559.085	810.313	6,3	5,8
SLA Umum	87.415	79.503	812.934	840.638	10,8	9,5
SLA Kejuruan	91.919	141.005	1.041.174	1.276.519	8,8	11,0

Sumber: BPS Sakernas 1976 dan Sakernas 1978.

dengan SLP Umum jumlah angkatan kerja lulusan SLP Kejuruan menurut dua penelitian tersebut, lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja lulusan SLP Umum. Sedangkan angkatan kerja lulusan SLA Kejuruan ternyata lebih besar daripada jumlah angkatan kerja lulusan SLA Umum. Hal ini juga menunjukkan bahwa Sekolah Kejuruan tingkat lanjutan atas memang ditujukan untuk mempersiapkan siswa sebagai tenaga kerja.

Segi positif yang diharapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan selain lebih terjaminnya untuk mendapatkan kerja, juga adanya pertimbangan tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan Sekolah Menengah Umum pada lapangan kerja yang sama. Namun dalam Tabel 5 berikut ini menunjukkan keadaan yang lain.

Tabel 5

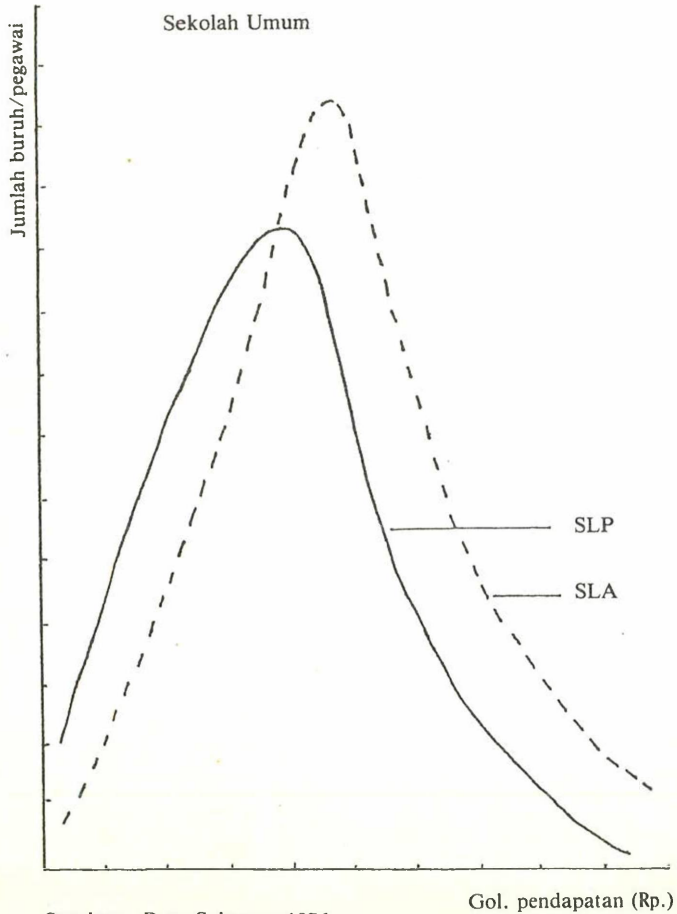
Keterangan	SLP		SLA	
	Umum	Kejuruan	Umum	Kejuruan
<i>Jumlah tahun pendidikan</i>	9	9	12	12*
<i>Pendapatan (nilai median) (Rp./bulan)</i>				
Tahun: 1976	18.300	18.268	25.615	21.961
1978	24.944	25.504	36.262	28.942

* Kecuali untuk lulusan STM Pembangunan adalah 13 tahun.

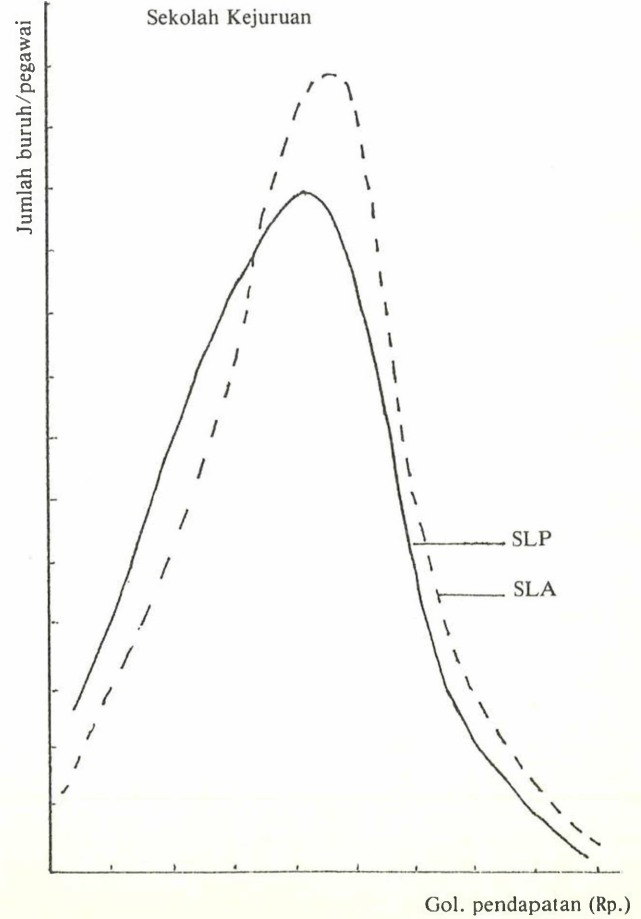
Sumber: Diolah dari data *Survey Angkatan Kerja Nasional* tahun 1976 dan tahun 1978.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pendapatan buruh/pegawai lulusan SLP Umum dan Kejuruan pada dua tahun penelitian tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti, bahkan pada tahun 1976 dapat dikatakan sama besarnya. Akan tetapi pendapatan buruh/pegawai lulusan SLA Umum ternyata lebih tinggi daripada lulusan SLA Kejuruan. Pada tahun 1976 pendapatan buruh/pegawai lulusan SLA Umum 17% lebih besar daripada lulusan SLA Kejuruan; sedangkan pada tahun 1978 lebih besar 25% daripada lulusan SLA Kejuruan. Sementara itu ongkos pendidikan untuk Sekolah Kejuruan adalah 10 kali lipat daripada Sekolah Umum setiap bangku sekolah. Ternyata harapan masyarakat terhadap lulusan Sekolah Kejuruan belum dapat terpenuhi semuanya.

Gambar 1



Gambar 2



Minat masyarakat yang cenderung lebih menghargai Sekolah Lanjutan Umum daripada Sekolah Lanjutan Kejuruan, dapat juga tercermin dari profil distribusi jumlah buruh/pegawai lulusan dari kedua jenis Sekolah Lanjutan ini menurut pendapatannya (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Gambar 1 menunjukkan distribusi jumlah buruh/pegawai lulusan Sekolah Lanjutan Umum, di mana terdapat pergeseran tingkat pendapatan yang cukup menyolok ke tingkat lebih tinggi dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu antara lulusan SLP dan lulusan SLA. Namun pada Gambar 2 yang menunjukkan distribusi jumlah buruh/pegawai lulusan Sekolah Lanjutan Kejuruan, terlihat bahwa pergeseran pendapatan antara lulusan SLP dan SLA tidak sedemikian menyolok seperti pada lulusan Sekolah Lanjutan Umum. Dengan demikian hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan, bahwa masyarakat lebih menghargai kerja yang "halus", misalnya sebagai pegawai kantor (white collar) yang pada umumnya lebih membutuhkan kecakapan berpikir daripada kerja yang sifatnya "kasar" (blue collar) yang membutuhkan ketrampilan.

PENUTUP

Dari uraian dan data-data yang dikemukakan di depan, kiranya menjadi lebih jelas permasalahan yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan beserta lulusannya. Penanggulangan terhadap masalah ini diharapkan dapat lebih memberikan daya tarik kepada Sekolah Kejuruan bagi masyarakat dan anak didik sebagaimana kita harapkan. Bagaimanapun, untuk menunjang pembangunan di masa mendatang, pendidikan kejuruan dalam Sistem Pendidikan Nasional sangat diperlukan. Dengan demikian, sangat diharapkan adanya pembangunan pendidikan kejuruan ini sejalan dengan pembaharuan dunia pendidikan secara semesta. Akan tetapi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan konsep kewiraswastaan yang sejauh ini telah dikembangkan secara efektif. Hal ini untuk mengimbangi masalah terbatasnya kemampuan para pencipta kerja.

Lampiran 1

 PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DAN BANTUAN LUAR NEGERI
 TERHADAP ANGGARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970-1981/1982

Tahun	Anggaran pembangunan ¹⁾ (milyar rupiah)	Dibiayai oleh	
		Tabungan pemerintah (%)	Bantuan luar negeri (%)
PELITA I			
1969/1970	118,2	23,0	77,0
1970/1971	176,8	31,9	68,1
1971/1972	214,4	36,8	63,2
1972/1973	310,3	49,1	50,9
1973/1974	458,3	55,5	44,5
PELITA II			
1974/1975	969,6	76,1	23,9
1975/1976	1.400,9	64,9	35,1
1976/1977	2.060,0	62,0	38,0
1977/1978	2.159,9	64,2	35,8
1978/1979	2.557,9	59,5	40,5
PELITA III			
1979/1980	4.016,1	65,6	34,4
1980/1981 ²⁾	5.027,7	70,1	29,9
1981/1982 ³⁾	6.399,2	74,6	25,4

1) Termasuk saldo anggaran lebih

2) APBN

3) RAPBN